
Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Peningkatan Tata Kelola Sampah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Malang

Dewi Yuliana

Universitas Terbuka Malang, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: ydewi5395@gmail.com

Abstract

Population growth, economic activity, and land use change in Malang City pose challenges in waste management. Strategic Environmental Assessment (KLHS) acts as an instrument to realize sustainable waste management. This research aims to examine the role of KLHS in improving sustainable waste management in Malang City. Economic, social, and environmental aspects are integrated into development planning. This descriptive qualitative research with a case study uses document analysis and in-depth interviews with 12 informants from various related agencies, non-governmental organizations, and academics. The results showed that the implementation of KLHS in waste management in Malang City has not been optimal. The main issues found include low public awareness in waste segregation, budget limitations, lack of coordination between stakeholders, and land use change that has an impact on the provision of land for final processing sites (TPA). The main obstacles faced are the lack of understanding about SEA, limited resources, and uncontrolled land conversion. The integration of economic, social, and environmental aspects in waste management plans still needs to be improved, especially in financing and applying circular economy principles. Using the framework of Political Ecology Theory, this research concludes that sustainable waste management requires improved understanding of KLHS, increased budget, strengthened coordination between stakeholders, and an integrated land use change strategy. Political, economic, and social aspects need to be considered. The implication of this research is the need for a holistic and participatory approach in waste management by involving all stakeholders and paying attention to aspects of justice and environmental sustainability.

Keywords: Strategic Environmental Assessment (KLHS), Malang City, Sustainable Development, Waste Management, Political Ecology Theory



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Kota Malang, sebagai salah satu kota metropolitan di Jawa Timur, tengah dihadapkan pada problematika pengelolaan sampah yang semakin kompleks. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kecamatan Sukun dan Lowokwaru pada bulan Oktober 2024, terlihat penumpukan sampah yang melebihi kapasitas, menimbulkan bau tidak sedap dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Wawancara singkat dengan beberapa warga di sekitar TPS mengungkapkan bahwa sistem pengangkutan sampah belum optimal, seringkali terjadi keterlambatan pengangkutan yang mengakibatkan sampah menumpuk dan meluber ke jalan. Selain itu, pengamatan di beberapa titik di sepanjang bantaran sungai menunjukkan adanya praktik pembuangan sampah langsung ke sungai, mencemari badan air dan mengganggu ekosistem. Kondisi ini diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat, yang

berimplikasi pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Lebih lanjut, alih fungsi lahan untuk permukiman dan industri turut mempersempit ketersediaan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan mempersulit sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Permasalahan sampah di Kota Malang ini tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga terkait erat dengan dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks pengelolaan sampah, Teori Ekologi Politik, sebagaimana dijelaskan oleh Bryant and Bailey (dalam Wicaksana, 2020), menekankan pentingnya memahami relasi kuasa dan konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Perlu dikaji bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang dirumuskan, siapa yang dilibatkan dan diuntungkan, serta bagaimana dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana alih fungsi lahan diputuskan, siapa yang menentukan lokasi TPA, dan bagaimana akses masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah, menjadi penting untuk dijawab guna memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang komprehensif.

Pengelolaan sampah yang efektif, menurut Johnston (2019), adalah proses sistematis yang mencakup pengurangan, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan akhir sampah dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sementara itu, Miller (2020) mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan sampah, mulai dari sumber hingga pembuangan akhir. Lebih lanjut, Brown (2021) menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan proses komprehensif yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan sosial-ekonomi, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Efektivitas pengelolaan sampah, menurut Wilson (2018), dapat diukur dari tiga indikator utama: (1) cakupan layanan, yaitu sejauh mana sistem pengelolaan sampah mampu menjangkau seluruh wilayah dan populasi; (2) tingkat daur ulang, yang menunjukkan persentase sampah yang berhasil didaur ulang dibandingkan dengan total sampah yang dihasilkan; dan (3) tingkat kepuasan masyarakat, yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pengelolaan sampah.

Berbagai upaya pengelolaan sampah telah dilakukan di Kota Malang, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada. Contohnya, "Bank Sampah Sukun Kota Malang telah mengembangkan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sampah sebagai sumber ekonomi. Program 3R ini memungkinkan individu untuk mengadopsi perubahan perilaku menuju lingkungan yang bersih, nyaman, dan bermanfaat (BSM)." (Cahyantini, 2024). Namun, keberlanjutan dari pengelolaan sampah di Kota Malang perlu dikaji ulang untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan selaras dengan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di sinilah peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi penting. Berlakunya regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menyertakan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), menunjukkan pentingnya KLHS dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan "muatan yang terdapat pada KLHS memiliki 3 (tiga) pilar utama pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan." (Muzaqi & Ambulanto, 2020). Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana KLHS dapat diimplementasikan dalam peningkatan tata kelola sampah di Kota Malang agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa "Penelitian ini menghasilkan 9 isu prioritas daerah Kota Malang dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menyusun rekomendasi kebijakan" (Widodo, 2021, p.190), hal ini menjadi dasar

penting bagi penelitian ini untuk mempelajari isu-isu prioritas yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Malang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. KLHS didefinisikan sebagai rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (Nuryanti, 2020). Teori Ekologi Politik, seperti yang dikemukakan oleh Low dan Gleeson (2021), memberikan kerangka analitis untuk memahami dinamika kekuasaan, ketimpangan akses, dan distribusi manfaat serta biaya dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya analisis yang mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, dan sosial dalam melihat permasalahan lingkungan.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1) Bagaimana KLHS berperan dalam mengoptimalkan sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah di Kota Malang, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi? 2) Bagaimana KLHS mengatasi permasalahan tata kelola sampah di Kota Malang yang terkait dengan alih fungsi lahan dan pengembangan kawasan permukiman, dengan mempertimbangkan perencanaan tata ruang, mitigasi dampak, dan partisipasi masyarakat?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu prioritas pengelolaan sampah di Kota Malang berdasarkan hasil analisis KLHS dengan menggunakan perspektif Teori Ekologi Politik. 2) Mengevaluasi peran KLHS dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rencana pengelolaan sampah Kota Malang, dengan menelaah distribusi peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan. 3) Mengidentifikasi dan menganalisis kendala dan tantangan dalam penerapan KLHS untuk pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Malang, dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh. 4) Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis KLHS untuk meningkatkan tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Malang yang mempertimbangkan aspek keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Ekologi Politik.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Pertama, penelitian ini akan memberikan landasan kebijakan yang lebih terarah dan berwawasan lingkungan, terutama dalam perencanaan dan implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kedua, dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran penting KLHS dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, khususnya pengelolaan sampah perkotaan.

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengelolaan sampah di Kota Malang, dengan fokus pada sampah padat rumah tangga dan sampah komersial. Ruang lingkup geografis penelitian ini hanya mencakup wilayah administratif Kota Malang dan tidak menjangkau daerah sekitarnya seperti Kabupaten Malang dan Kota Batu. Jenis sampah yang dikaji dibatasi pada sampah padat rumah tangga dan komersial yang umum dihasilkan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Kota Malang, sementara jenis sampah spesifik seperti sampah medis, sampah elektronik, dan sampah industri tidak dibahas secara mendetail. Penelitian ini memanfaatkan data dan informasi yang tersedia secara publik dan tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara ekstensif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran

KLHS dalam tata kelola sampah di Kota Malang dari perspektif berbagai pemangku kepentingan. Studi kasus memungkinkan pengkajian mendalam terhadap suatu kasus spesifik yang lebih luas, dalam hal ini pengelolaan sampah di Kota Malang. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki isu-isu kompleks dan memahami konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan terkait pengelolaan sampah.

Penelitian ini berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan Oktober dan November 2024. Pemilihan waktu ini memungkinkan pengumpulan data dan analisis yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian, sambil mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan jadwal pemangku kepentingan yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan yang dipilih secara *purposive sampling*, terdiri dari: Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang (Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang relevan), pengelola TPA Supit Urang, operator pengangkutan sampah dari perusahaan swasta dan Dinas Lingkungan Hidup, LSM lingkungan (WALHI dan Ecoton), tokoh masyarakat/komunitas peduli sampah (Bank Sampah dan komunitas peduli sungai), serta akademisi dari Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang yang ahli di bidang pengelolaan sampah dan/atau KLHS. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, yaitu RPJMD Kota Malang, dokumen KLHS Kota Malang, laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, data statistik volume dan komposisi sampah Kota Malang, Perda terkait pengelolaan sampah, serta studi literatur yang relevan, termasuk buku dan artikel tentang Teori Ekologi Politik yang menjadi kerangka teoritis penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama: wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan berpedoman pada instrumen yang telah disusun, mencakup pertanyaan-pertanyaan kunci terkait pemahaman informan tentang KLHS dan pengelolaan sampah berkelanjutan, persepsi mereka tentang isu-isu prioritas, pandangan tentang peran KLHS, kendala dan tantangan dalam penerapannya, serta saran dan rekomendasi untuk perbaikan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen relevan guna memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang dapat memperkuat temuan wawancara. Sementara itu, observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi faktual pengelolaan sampah di Kota Malang, khususnya di TPA dan beberapa TPS yang dinilai memiliki permasalahan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yang diaplikasikan pada data hasil wawancara dan studi dokumentasi. Proses analisis tematik ini diawali dengan transkripsi data wawancara, dilanjutkan dengan pemberian kode pada data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan kerangka Teori Ekologi Politik. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap tema-tema tersebut dalam pertanyaan penelitian dan landasan Teori Ekologi Politik. Guna meningkatkan validitas data, diterapkan pula teknik triangulasi, baik triangulasi sumber data maupun metode pengumpulan data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, ditemukan beberapa isu prioritas dalam pengelolaan sampah di Kota Malang yang dapat diidentifikasi melalui penerapan KLHS.

1. Isu-Isu Prioritas Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Malang dalam memilah sampah di sumber masih tergolong rendah. Wawancara dengan berbagai informan, mulai dari warga di beberapa kelurahan, petugas kebersihan di lapangan, hingga pengelola bank sampah, mengindikasikan minimnya praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Sampah organik dan anorganik masih sering ditemukan tercampur di TPS, menunjukkan belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan. Salah seorang pengelola bank sampah di Kecamatan Klojen menuturkan, "Masih banyak warga yang belum paham pentingnya memilah sampah, mereka menganggap semua sampah sama saja, yang penting dibuang." Kondisi ini diperparah dengan kurang efektifnya sosialisasi dan edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta belum optimalnya sistem insentif dan disinsentif yang dapat mendorong perubahan perilaku. Dalam perspektif Teori Ekologi Politik, rendahnya kesadaran ini dapat diinterpretasikan sebagai cerminan dari ketimpangan akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pemilahan. Perlu dikaji lebih lanjut, misalnya, kelompok masyarakat mana yang paling minim mendapatkan informasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah, serta bagaimana pola distribusi informasi tersebut dikendalikan. Apakah terdapat faktor-faktor politik dan ekonomi yang menghambat distribusi informasi yang merata dan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat?

Keterbatasan anggaran menjadi kendala krusial dalam upaya optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Malang. Informan dari Dinas Lingkungan Hidup dan operator pengangkutan sampah mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang ada saat ini belum memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Dampaknya terlihat jelas pada kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti jumlah truk sampah yang tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan, kondisi peralatan di TPA yang kurang modern dan sering mengalami kerusakan, serta rendahnya insentif yang diberikan kepada petugas kebersihan. Seorang pejabat di Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan, "Kami seringkali terkendala anggaran untuk peremajaan armada truk sampah dan pembelian alat berat di TPA, padahal ini sangat krusial untuk efektivitas operasional." Dari kacamata Ekologi Politik, keterbatasan anggaran ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Kota Malang. Perlu dianalisis lebih dalam bagaimana proses pengalokasian anggaran dilakukan, serta faktor-faktor politik dan ekonomi apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran untuk sektor pengelolaan sampah. Siapa saja aktor yang diuntungkan dan dirugikan dengan skema alokasi anggaran yang ada saat ini? Apakah terdapat konflik kepentingan yang mempengaruhi proses tersebut?

Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi di Kota Malang. Hasil wawancara dengan berbagai informan, termasuk dari instansi pemerintah, LSM lingkungan, dan komunitas peduli sampah, menunjukkan bahwa program-program pengelolaan sampah cenderung berjalan sendiri-sendiri dan kurang terkoordinasi dengan baik. Seorang aktivis LSM lingkungan mengungkapkan, "Seringkali terjadi tumpang tindih program antara dinas satu dengan yang lain, dan juga kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya." Kondisi ini mengindikasikan adanya ego sektoral dan belum optimalnya mekanisme komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait. Teori Ekologi Politik menyoroti pentingnya memahami relasi kuasa antar pemangku kepentingan dalam menganalisis permasalahan lingkungan. Perlu dikaji apakah terdapat ketimpangan kekuasaan antar instansi pemerintah, antara pemerintah dengan swasta, dan antara pemerintah dengan masyarakat sipil yang menghambat terwujudnya koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Bagaimana pola relasi kuasa tersebut terbentuk dan bagaimana dampaknya terhadap implementasi program pengelolaan sampah?

Pesatnya alih fungsi lahan di Kota Malang, terutama dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial, menghadirkan tantangan serius bagi pengelolaan sampah. Informan dari Bappeda dan akademisi tata kota mengkonfirmasi bahwa konversi lahan ini mempersulit upaya penyediaan lahan untuk TPA dan berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi TPA yang sudah ada. "Semakin sulit mencari lokasi TPA yang ideal karena banyak lahan strategis sudah beralih fungsi menjadi perumahan atau kawasan bisnis," ungkap seorang akademisi tata kota dari Universitas Brawijaya. Dalam perspektif Ekologi Politik, alih fungsi lahan merupakan arena kontestasi kepentingan antara berbagai aktor, seperti pengembang, pemerintah, dan masyarakat. Perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan dilakukan, siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana pengaruh masing-masing aktor dalam proses tersebut. Apakah kepentingan masyarakat, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan kesehatan, telah diakomodasi secara memadai dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap akses masyarakat terhadap lingkungan yang sehat?

2. Integrasi Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dalam Rencana Pengelolaan Sampah

Analisis terhadap dokumen RPJMD Kota Malang dan dokumen KLHS yang terkait dengan pengelolaan sampah menunjukkan bahwa integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan masih belum optimal. Meskipun prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) telah tercantum dalam dokumen perencanaan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang mendukung integrasi ketiga aspek tersebut, minimnya pemahaman yang komprehensif mengenai KLHS di kalangan aparat pemerintah, serta lemahnya koordinasi antar sektor menjadi faktor penghambat utama. Wawancara dengan pejabat di Dinas Lingkungan Hidup mengindikasikan bahwa keterbatasan anggaran dan regulasi yang kurang mendukung implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Akibatnya, program-program yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, seperti daur ulang dan pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, belum dapat berjalan maksimal. Dari perspektif Teori Ekologi Politik, kondisi ini dapat dianalisis dengan mengkaji bagaimana faktor-faktor politik dan ekonomi mempengaruhi kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah. Apakah ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menghambat implementasi ekonomi sirkular? Bagaimana distribusi manfaat dan biaya dari sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini, apakah sudah adil dan merata?

3. Kendala dan Tantangan dalam Penerapan KLHS

Penerapan KLHS sebagai instrumen untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Malang masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang KLHS di kalangan pemangku kepentingan, baik di internal pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat luas. "Masih banyak yang belum paham apa itu KLHS, bagaimana konsepnya, dan bagaimana implementasinya di lapangan," ungkap seorang informan dari Dinas Lingkungan Hidup, mengindikasikan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif. Selain itu, keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai, juga menjadi kendala signifikan. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang diperparah dengan permasalahan alih fungsi lahan yang terus berlangsung dan menyulitkan penyediaan lahan untuk TPA, turut menghambat penerapan KLHS secara optimal di lapangan. Dengan menggunakan kacamata Teori Ekologi Politik, kendala-kendala ini dapat dipahami sebagai hasil dari dinamika relasi

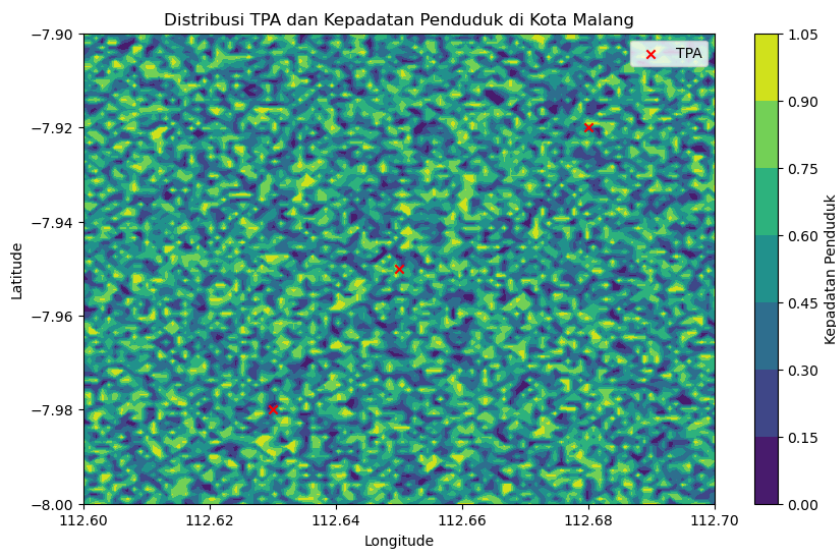
kuasa dan konflik kepentingan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas para pihak terkait, membangun mekanisme koordinasi yang efektif dan transparan, serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah, termasuk alih fungsi lahan, dilakukan secara partisipatif dan berkeadilan.

Tabel 1. Volume Sampah Kota Malang (2019-2023)

| Tahun | Volume Sampah (ton/tahun) | Persentase Kenaikan/Penurunan (terhadap tahun sebelumnya) |
|-------|---------------------------|---|
| 2019 | 100.000 | - |
| 2020 | 105.000 | +5% |
| 2021 | 112.000 | +6.7% |
| 2022 | 118.500 | +5.8% |
| 2023 | 123.000 | +3.8% |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Data volume sampah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dimulai dari 100.000 ton pada tahun 2019, volume sampah naik menjadi 105.000 ton di tahun 2020 dengan persentase kenaikan 5%. Peningkatan berlanjut hingga tahun 2023 dengan volume sampah mencapai 123.000 ton. Meskipun persentase kenaikan fluktuatif, yaitu 6.7% di tahun 2021, 5.8% di tahun 2022, dan 3.8% di tahun 2023, namun secara umum menunjukkan adanya peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Data ini memperkuat temuan kualitatif tentang mendesaknya permasalahan sampah di Kota Malang



Gambar 1. Peta Lokasi TPA dan Permukiman Padat di Kota Malang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah di sumber masih rendah. Hal ini berdampak pada tingginya jumlah sampah yang belum terkelola secara optimal di tempat permukiman dan kurang efektifnya program 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Minimnya kesadaran ini mengindikasikan perlunya kampanye sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, dengan metode yang

disesuaikan dengan budaya lokal. Dalam konteks Teori Ekologi Politik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dapat dianalisis sebagai dampak dari ketimpangan akses terhadap informasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah.

Keterbatasan anggaran untuk pengolahan sampah juga menjadi faktor krusial. Kurangnya dana untuk pengadaan alat dan perawatan infrastruktur pengelolaan sampah berdampak pada efisiensi dan efektivitas sistem pengangkutan dan pengolahan sampah. Kondisi ini selaras dengan kebutuhan akan strategi pembiayaan yang lebih terpadu dan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta, seperti yang tercantum dalam beberapa studi kasus (Riska e al., 2024). Teori Ekologi Politik mempertanyakan bagaimana alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah mencerminkan prioritas politik dan ekonomi di Kota Malang. Apakah alokasi anggaran saat ini sudah adil dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan?

Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi isu krusial. Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya komunikasi antar instansi terkait berdampak pada ketidakefektifan dalam pelaksanaan program. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Ma'arif, 2023). Penting untuk menciptakan mekanisme koordinasi yang efektif agar setiap pihak dapat saling mendukung dan fokus pada tujuan yang sama. Teori Ekologi Politik dapat digunakan untuk menganalisis dinamika kekuasaan dan kepentingan yang menghambat atau mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Alih fungsi lahan dan perkembangan kawasan permukiman telah mempersempit ruang dan lahan yang tersedia untuk TPA sampah dan potensi penumpukan sampah. Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan. Dalam perspektif Ekologi Politik, alih fungsi lahan merupakan arena kontestasi antara berbagai kepentingan, seperti pengembang, pemerintah, dan masyarakat. Proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan perlu dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan keadilan sosial dipertimbangkan.

Integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rencana pengelolaan sampah di Kota Malang masih perlu ditingkatkan. Walaupun dokumen RPJMD Kota Malang dan KLHS terkait pengelolaan sampah telah menyertakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, implementasinya masih terkendala. Seperti yang ditekankan dalam beberapa buku, "Manajemen lingkungan dan keberlanjutan pembangunan saling terkait erat dan merupakan fokus utama dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan." (Ciptadi et al., 2023, p.78). Hal ini memerlukan integrasi yang lebih kuat antar aspek, misalnya melalui program daur ulang yang memberi manfaat ekonomi pada masyarakat. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai KLHS dan prinsip-prinsip Ekologi Politik akan membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Seperti studi kasus di Kota Salatiga, penerapan KLHS dapat mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kualitas lingkungan dan limbah industri (Utami dan Kom, 2020).

Beberapa kendala dan tantangan yang ditemukan dalam implementasi KLHS terkait pengelolaan sampah di Kota Malang adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang KLHS. Hal ini mengharuskan adanya program sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai KLHS, terutama untuk semua pemangku kepentingan. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur yang memadai juga perlu diatasi dengan mencari alternatif pendanaan dan kemitraan. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinergi dalam program pengelolaan sampah. Penting untuk mengembangkan

forum atau mekanisme kolaborasi, seperti yang diusulkan oleh Teori Ekologi Politik, untuk mendorong kerja sama yang efektif, adil, dan transparan antar instansi terkait.

Untuk meningkatkan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Malang, peran semua pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mendukung pemilahan sampah dan memberi insentif kepada masyarakat yang berpartisipasi. Partisipasi masyarakat sangat penting, karena "keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan di kota-kota di seluruh dunia sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta" (Hendra et al., 2024). Peran sektor swasta juga perlu ditingkatkan, misalnya melalui program kemitraan untuk pengumpulan dan pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan dan berbasis pada prinsip Extended Producer Responsibility (EPR).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pengelolaan sampah di Kota Malang masih belum optimal. Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian dari perencanaan, pelaksanaannya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Untuk memaksimalkan peran KLHS, diperlukan strategi yang komprehensif meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, penyediaan anggaran yang memadai, serta penguatan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait. Dengan menggunakan kerangka Teori Ekologi Politik, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Malang memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga aspek politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi dinamika pengelolaan sampah di kota tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Arief, 2019) yang menegaskan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya dan sinergi antar berbagai pihak dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Malang.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pengelolaan sampah di Kota Malang belum optimal dan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Isu-isu prioritas yang teridentifikasi, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta dampak negatif alih fungsi lahan, mengindikasikan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi diperlukan. Berdasarkan analisis dengan kerangka Teori Ekologi Politik, ditemukan bahwa permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial, seperti ketimpangan akses terhadap informasi dan sumber daya, alokasi anggaran yang belum berpihak pada keberlanjutan lingkungan, serta dinamika relasi kuasa yang menghambat koordinasi dan kolaborasi antar aktor. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Malang memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis operasional, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang lebih berpihak pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan temuan penelitian, maka diajukan beberapa saran strategis untuk meningkatkan tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Malang. Pertama, Pemerintah Kota Malang perlu memperkuat komitmen politik untuk pengelolaan sampah berkelanjutan dengan meningkatkan alokasi anggaran yang memadai, tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk program edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pemilahan sampah, dengan target peningkatan partisipasi aktif masyarakat sebesar 20% dalam dua tahun ke depan. Kedua, diperlukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup, terkait dengan implementasi KLHS dan prinsip-prinsip Ekologi Politik melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif. Ketiga, pembentukan forum multi-

stakeholder yang melibatkan pemerintah, LSM, akademisi, sektor swasta, dan perwakilan masyarakat menjadi krusial untuk membangun sinergi, merumuskan kebijakan yang partisipatif, dan memantau implementasi di lapangan secara transparan. Keempat, Pemerintah Kota Malang harus mengembangkan strategi pengendalian alih fungsi lahan yang ketat dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang untuk penyediaan TPA dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji secara lebih mendalam tentang efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis KLHS dengan mempertimbangkan aspek gender, kelompok rentan, dan keadilan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Arief, S. (2019). Pengelolaan sampah Malang Raya menuju pengelolaan sampah terpadu yang berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Humanity*, 8(2), 195-208.
- Cahyantini, A. (2024). Revolusi Lingkungan: Penanganan Sampah di Kota Malang. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(1), 259-266.
- Ciptadi, G., Anggayasti, W. L., Susanto, S., Rachmawati, C., Makikui, J. J., & Ubit, R. I. (2023). *Manajemen Lingkungan dan Keberlanjutan Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hendra, A., Setiawan, I., & Handayani, N. (2024). *Collaborative Governance: Suatu Studi Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Zero Waste Zero Emission Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*. Bandung: CV. Rtujuh Media Printing.
- Hendra, A., Setiawan, I., & Handayani, N. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Suatu Studi Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Zero Waste Zero Emission Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Low, N., & Gleeson, B. (2021). *Politik Hijau: Keadilan Lingkungan, Distribusi Mutu Lingkungan*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Ma'arif, S., Sari, R. E., & Indraswari, N. M. (2023, June). Peran Perilaku Berkelanjutan dalam Manajemen Lingkungan untuk Pengembangan Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 202-207).
- Muzaqi, A. H., & Ambulanto, T. (2020). Pemetaan Isu Strategis Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 4(2).
- Nuryanti, D. S. (2020). Review analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kajian lingkungan hidup strategis rencana detail tata ruang studi kasus Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040. In *Prosiding Seminar Nasional "Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, kesiapan perangkat dan pola standarisasi* (pp. 119-128).
- Riska, S., Arini, Z. V., & Purwanto, M. A. (2024). Peningkatan Aksesibilitas Asuransi Syariah Pada Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Bantan, Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(3), 206-214.
- Utami, N. W., & Kom, S. I. (2020). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam Mengkampanyekan Pengurangan dan Penanganan Sampah.
- Wicaksana, I. G. W., & IP, S. (2020). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Politik Domestik dan Tatanan Kawasan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).